



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**



**NEGARA
MAYAP** | **KPU**
Melayani

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Bone Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Bone Tahun 2020 - 2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Bone, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Bone. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Bone dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Bone melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Bone Tahun 2020 - 2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU Kabupaten Bone sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Watampone, 29 Desember 2020


KATA PENGANTAR
IZHARUL HAQ

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone	14
BAB 2 VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BONE	28
2.1 Visi KPU Kabupaten Bone	28
2.2 Misi KPU Kabupaten Bone	28
2.3 Tujuan KPU Kabupaten Bone	29
2.4 Sasaran Strategi KPU Kabupaten Bone	29
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE	31
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	31
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum	32
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Bone	33
3.4 Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Bone	34
3.5 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Bone	36
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE 2020-2024	38
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis	38
4.2 Kerangka Pendanaan	42
BAB 5 PENUTUP	46
LAMPIRAN	47

BAB 1 PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi pada Pasal 1 ayat 14 adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

KPU Kabupaten Bone adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Bone dan dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Bone melaksanakan penyusunan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Bone untuk periode 2020-2024 berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kp/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di Lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kabupaten Bone periode 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Bone.

1.1. Kondisi Umum

KPU Kabupaten Bone merupakan bagian integral dari penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan berpegang pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas. Salah satu tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terbagi kedalam 5 (lima) Divisi yaitu :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- 3) Divisi Perencanaan, Data dan informasi;
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan.

Didalam melaksanakan tugas-tugasnya KPU Kabupaten Bone dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat KPU Kabupaten Bone terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian yaitu :

- 1) Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- 2) Kepala Sub Bagian Program dan Data;
- 3) Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; dan
- 4) Kepala Sub Bagian Hukum.

1.1.1. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Bone

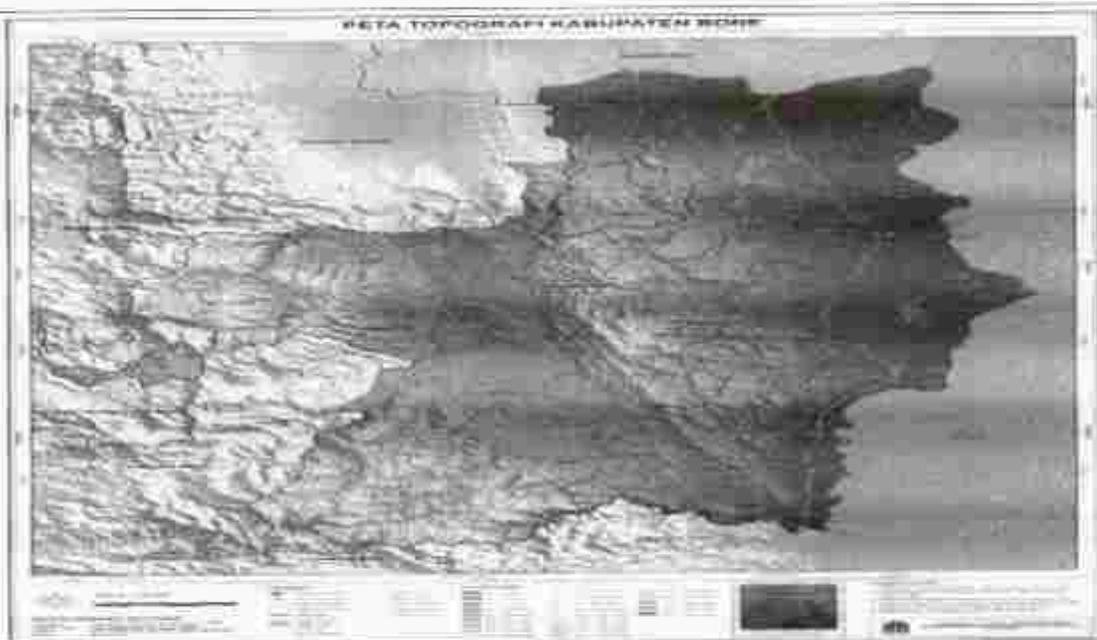
Pemilu legislatif diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Bone. Pemilu Legislatif diikuti oleh 16 (enam belas) Partai Politik, yaitu :



**Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019
di Kabupaten Bone**

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bone terdapat 543.646 jiwa yang tercatat sebagai Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dengan rincian sebagai berikut :

DAPIL I	
Tanete Riattang	
LK	15.434 Jiwa
PR	18.105 Jiwa
Jml	33.539 Jiwa
T.R. Barat	
LK	14.065 Jiwa
PR	15.841 Jiwa
Jml	29.906 Jiwa
T.R. Timur	
LK	13.818 Jiwa
PR	14.680 Jiwa
Jml	28.498 Jiwa
Palakka	
LK	8.271 Jiwa
PR	9.495 Jiwa
Jml	17.766 Jiwa



Gambar 2 Peta Sebaran Pemilih Kabupaten Bone Perdapil

TOTAL

543.646

Jiwa Pemilih

DAPIL III	
Salomekko	
LK	5.624 Jiwa
PR	5.865 Jiwa
Jml	11.489 Jiwa
Kajuara	
LK	12.253 Jiwa
PR	12.999 Jiwa
Jml	25.252 Jiwa
Kahu	
LK	13.682 Jiwa
PR	15.141 Jiwa
Jml	28.823 Jiwa
Libureng	
LK	10.710 Jiwa
PR	11.563 Jiwa
Jml	22.273 Jiwa
Patimpeng	
LK	5.745 Jiwa
PR	6.294 Jiwa
Jml	12.039 Jiwa
Bontocani	
LK	6.362 Jiwa
PR	6.497 Jiwa
Jml	12.859 Jiwa

DAPIL V	
Awangpone	
LK	10.387 Jiwa
PR	12.060 Jiwa
Jml	22.447 Jiwa
Tellu Slattinge	
LK	14.455 Jiwa
PR	16.355 Jiwa
Jml	30.801 Jiwa
Cenrana	
LK	8.514 Jiwa
PR	9.359 Jiwa
Jml	17.873 Jiwa
Dua Boccoe	
LK	10.754 Jiwa
PR	12.515 Jiwa
Jml	23.069 Jiwa
Ajangale	
LK	9.409 Jiwa
PR	10.722 Jiwa
Jml	20.131 Jiwa

DAPIL IV	
Ulaweng	
LK	9.272 Jiwa
PR	10.300 Jiwa
Jml	19.572 Jiwa
Amali	
LK	7.133 Jiwa
PR	8.456 Jiwa
Jml	15.589 Jiwa
Bengo	
LK	9.100 Jiwa
PR	10.151 Jiwa
Jml	19.251 Jiwa
Lamuru	
LK	9.768 Jiwa
PR	10.533 Jiwa
Jml	20.301 Jiwa
Lapri	
LK	8.996 Jiwa
PR	9.752 Jiwa
Jml	18.748 Jiwa
Tellu Limpoe	
LK	5.592 Jiwa
PR	5.468 Jiwa
Jml	11.060 Jiwa

Hasil Pemilu Legislatif di Kabupaten Bone, menetapkan 12 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bone dan 4 Partai lainnya tidak mendapatkan kursi, adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 1 Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Bone
Pemilihan Umum 2019**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Presentase Suara Sah	Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	25.546	6%	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	41.920	10%	5
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	25.561	6%	3
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	81.715	19%	9
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	37.287	9%	4
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	823	0%	0
7.	Partai BERKARYA	18.198	4%	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	33.512	8%	4
9.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	18.738	4%	1
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	24.439	6%	2
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.115	0%	0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	37.594	9%	5
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	21.241	5%	2

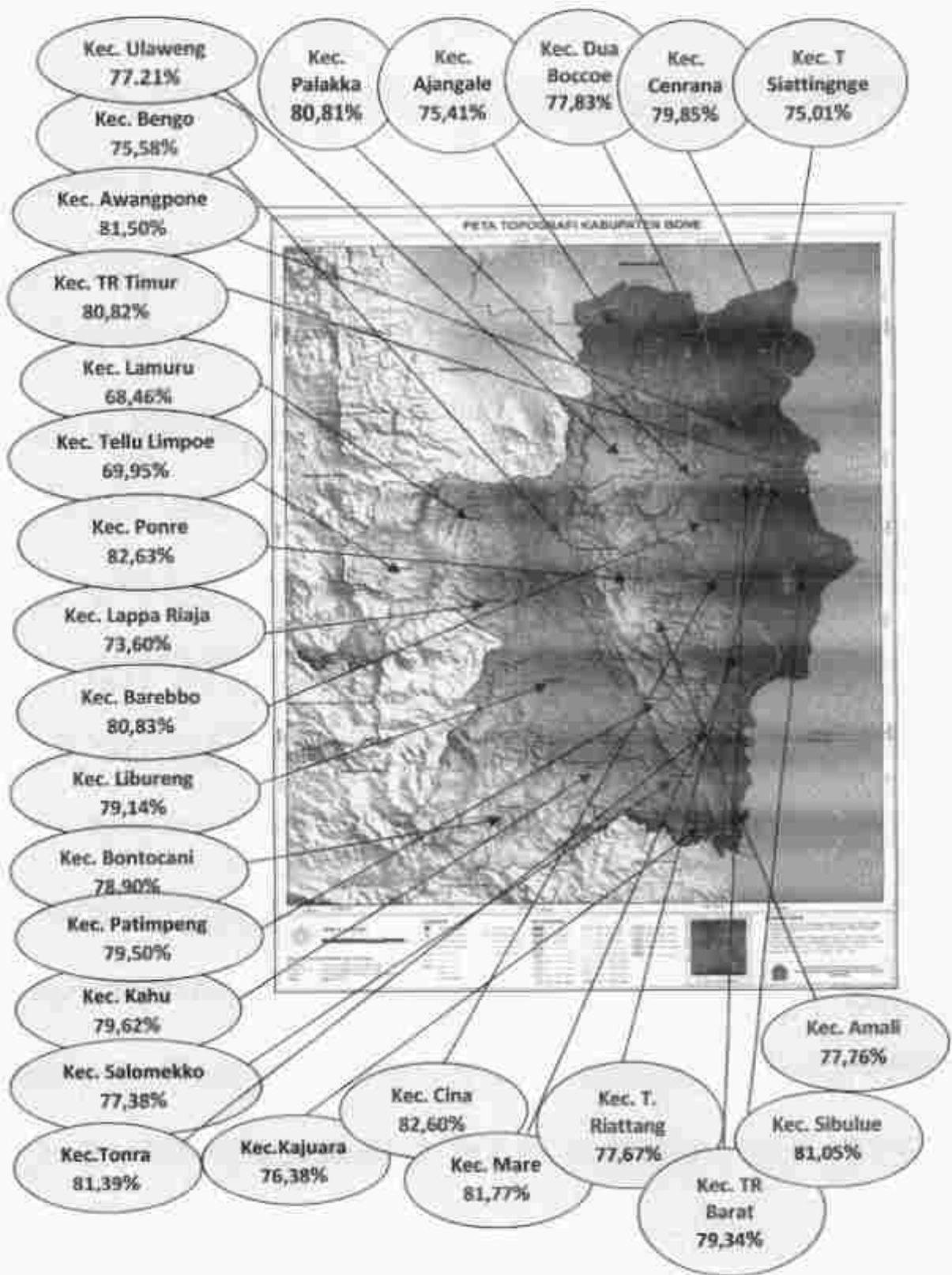
14.	Partai DEMOKRAT	37.200	9%	5
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	16.992	4%	2
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	161	0%	0

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (PILPRES) Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah menetapkan perolehan suara tingkat Kabupaten Bone masing-masing pasangan calon yaitu :

Tabel 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Kabupaten Bone

No.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1		238.686	55.76%
2		189.390	44.24%

Secara Umum, Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Kabupaten Bone berjalan dengan demokratis, aman, dan damai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang independen, jujur, adil dan transparan serta sinergitas yang tinggi bersama aparat keamanan dan stakeholder lainnya. Selain itu KPU Kabupaten Bone juga telah berhasil melampaui target partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, dimana target yang ditetapkan secara nasional adalah 77,5% dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bone mencapai 79.95%. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bone menjadi gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum semakin meningkat, hal ini juga tidak terlepas dari kerja keras KPU Kabupaten Bone dalam melakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di seluruh kelompok masyarakat mulai dari kelompok Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Pemilih Disabilitas, kelompok pemuda dan lain sebagainya. Data Partisipasi masyarakat per Daerah Pemilihan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3 Tingkat Partisipasi Pemilih Per Kecamatan

Pada Periode 2015-2019, KPU Kabupaten Bone telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bone 2015-2019. Adapun Sasaran Strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis
 - a. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya
 - f. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Penyelenggara Adhock yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bone.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Bone tahun 2015-2019 diuraikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Bone 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan yang Demokratis	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;	77,5%	79,95%	100%
		Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	75,5%	81,56 %	100%
		Persentase partisipasi	75%	42,68 %	57%

		pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan			
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	5%	4%	90%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	80%	79.95%	99.99%
		Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku yang efektif, efisien, transparan akuntabel dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil	Persentase Penyelenggara Adhock yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan	3%	0%	0%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bone	100%	100%	100%

1.1.2. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suara komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. **Sifat Nasional** dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Sifat tetap** dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu

3. **Sifat mandiri** dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan professional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menajalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. **Integritas** penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. **Jujur**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. **Mandiri**, bermakna bahwa Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh dari siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil
3. **Adil**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu hak dan kewajibannya.
4. **Akuntabel**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu meaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip atau asas :

1. **Berkepastian Hukum**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. **Aksesibilitas**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menyediakan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan
3. **Tertib**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukan informasi public;
5. **Proporsional**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan Umum**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
 Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu :
 1. **Asas Langsung**, memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
 2. **Asas Umum**, semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh

bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial

3. **Asas Bebas**, setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. **Asas Rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. **Asas Jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. **Asas Adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 2020-2024 yang baik diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan

Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada seluruh peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan

14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPK dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Walikota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
 - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur
9. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan Laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota;
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban meliputi :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pamilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumn serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
10. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Bone 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bone diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas di Kabupaten Bone dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Beberapa potensi **kekuatan (Strong)** yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Bone bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu serentak.
6. KPU Kabupaten Bone membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu tahun 2019.

Sementara itu, permasalahan/**kelemahan (Weakness)** yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak, adalah :

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten.
2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Budaya kerja organisasi masih lemah.
4. Jumlah dan komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja.
5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
6. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yang diberikan.
7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, gtepat kualitas, dan tepat sasaran.

1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Bone 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone juga dihadapkan pada sejumlah **Peluang (Opportunities)** yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Peluang tersebut diantaranya :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Bone sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi.
2. Tinggi animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Selain itu KPU Kabupaten Bone juga menghadapi **ancaman (threats)** yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman tersebut dapat memberikan dampak negatif baik kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia khususnya di Kabupaten Bone. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat.
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara.
5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran.

1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Bone, yakni potensi (Kekuatan), permasalahan (Kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Bone, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat

berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada table berikut :

Tabel 4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan VS Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
POTENSI/KEKUATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Bone bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik 5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 7. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu 2019
PELUANG	<p>Menggunakan Kekuatan dan memanfaatkan peluang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan lonaqa secara adil dan wajar (merit system) 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan karakter korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan Dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
POTENSI/KEKUATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Bone sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital

Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
PERMASALAHAN/KELEMAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten 2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 3. Budaya kerja organisasi masih lemah 4. Jumlah dan komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja 5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 6. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dan KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yang diberikan 7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
PELUANG	<p>Mengatasi Kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Bone sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan 3. Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap subbagian 4. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat 5. Menyelenggarakan tata kelola manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) 6. Melakukan koordinasi dengan sgenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
POTENSI/KEKUATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dari usia 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Bone bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik 5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 7. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu 2019
ANCAMAN	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu maupun setelah Pemilu 9. Meningkatkan Pengawasan Internal 10. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara 5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran

Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
PERMASALAHAN/KELAMAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat diaplikasikan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 4. Budaya kerja organisasi masih lemah 5. Jumlah dan komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 7. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yang diberikan 8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
ANCAMAN	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 2. Menyusun SOP setiap subbagian, disertai pengukuran Indikator kinerjanya disetiap subbagian 3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal 4. Menyelenggarakan Pembinaan sumber daya manusia 5. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas 6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran 7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu 8. Meningkatkan Pengawasan Internal 9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, dan penganggaran, koordinasi antar lembaga

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesis menjadi sebagai berikut :

Tabel 8 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Bone 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar stakeholder c. Meningkatkan Pengawasan Internal d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Administrasi keuangan e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) f. Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indikator kinerjanya disetiap subbagian g. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu i. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 	<p>1. Meningkatkan tata kelola / manajemen</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Transparan, Akuntabel, dan Berintegritas 	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan Pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi b. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih secara berkala dan berkelanjutan 	<p>4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 4 (empat) strategi utama dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 2020-2024 atau disebut "*manifestasi politik*" yang merupakan akronim dari :

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
3. Meningkatkan investasi aset teknologi
4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

BAB 2

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

2.1. Visi KPU Kabupaten Bone

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengadopsi Visi dan Misi KPU RI, dimana visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pengertian kata *Mandiri, Profesional dan Berintegritas* adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa jajaran KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
3. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi KPU Kabupaten Bone

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum dari upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Bone untuk mewujudkan Visi. KPU Kabupaten Bone Periode 2020-2024, yang merupakan bagian dari KPU RI juga mengadopsi Misi dari KPU RI yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Melaksanakan Peraturan dibidang Kepemiluan dan Pemilihan dalam upaya memeberikan kepastian hukum , progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bone yang efektif, efisien, transparan, akuntabel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan

5. Berupaya meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilu serentak dan Pemilihan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak dan Pemilihan kepada seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai Visi dan Misi, tersebut dan berdasar pada visi, misi dan program KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menyusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menjadikan Organisasi KPU Kabupaten Bone yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai kewibawaan dan kejujuran tanpa terpengaruh oleh entitas lain
2. Berupaya memberikan pelayanan terbaik dibidang Pemilu dan Pemilihan

2.3. Tujuan KPU Kabupaten Bone

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, serta melakukan sinkronisasi dengan KPU RI selaku penyelenggara pemilu tingkat Pusat, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu serentak dan Pemilihan yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

2.4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bone

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang politik yang kuat
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas

Sasaran Strategis untuk tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu : Terwujudnya Pemilu serentak dan Pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone mengacu pada arah kebijakan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 secara umum serta arah kebijakan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2020-2024 secara khusus.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan Reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah member ruang yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga Negara dalam proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut Rencana Pembangunan Nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1) Kualitas Representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara waklin dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan

- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ke tujuh "memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokrasi
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi publik

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya disetiap eselon (jabatan)
 - d. Menyusun Standar Layanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi

- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan dilingkungan KPU
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
 - f. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Bone

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional serta Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone memformulasikan dan menetapkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 2020-2024 sebagai berikut :

- 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar

BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis disajikan dalam table di bawah ini :

Tabel 9 Target Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mewujudkan Komital Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	74	75	76	77	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	8	8	8	8	8
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh Lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	77%	77%
	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0,17%	0,16%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan	-	-	100%	100%	100%

Tabel 10 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Batasan Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	85	88	90	92	95
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	74	75	76	77	78
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya Kejasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	8 kegiatan	9 kegiatan
	Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	5 kali	7 kali	7 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	27 Kec	27 Kec
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya Pembinaan Perbeodaharaan	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyempitan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

Undangan yang berlaku	SAK						
4. Penyelenggaraan Operasional, dan Dukungan Barana dan Prasarana Perkantoran							
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat diporusi dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil Rapat Pleno yang diindaklarjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor	Persentase Gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 11 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu / Pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Tahapan Pemilu / Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal	-	-	-	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Tertelaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	-	-	-	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Tertelaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	-	-	-	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang sesuai jadwal Persentase Pemutakhiran Data Wilayah / Pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	100%
	Tertelaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Bone dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%

	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase kepengurusan dan keuangan partai politik yang dimutakhirkan	Data dan politik	-	40%	80%	40%	50%
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat								
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilu		100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu		100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilu kepada masyarakat umum	Persentase Pendidikan Pemilu Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat Umum		100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilu kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas	Persentase Pendidikan Pemilu Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan		100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendidikan Pemilu Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula		100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendidikan Pemilu Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas		100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPTD sesuai dengan SOP		100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang dimuat di 5 Media massa		-	-	-	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja		-	-	-	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Pardol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi		-	-	-	100%	100%
Pelaksanaan Pengelolaan Logistik								
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan	Persentase Penuhannya kebutuhan anggaran dalam pemenuhan Logistik Pemilu / Pemilihan		-	-	-	100%	100%
		Persentase Pengadaan Logistik Pemilu / Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara		-	-	-	100%	100%
		Persentase Ketepatan Logistik yang didistribusikan baik tepat jenis, jumlah dan waktu		-	-	-	100%	100%
		Persentase Penginventarisasian dan Pemeliharaan Logistik Pemilu / Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara		-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu / Pemilihan		-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara	Persentase Pelaksanaan		-	-	-	100%	100%

	Pemilih Hasil Pemilu	Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dalam Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%	100%
		Persentase dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	-	-	-	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.021.283.000,- (Tiga Miliar Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 2.859.924.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, sebesar Rp. 161.359.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menargetkan rencana pendanaan periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 11 Kerangka Target Rencana Pendanaan Program Kegiatan Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.859.283	3.300.000	4.000.000	32.500.000	38.500.000	81.160.283
076.01.05	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	161.000	350.000	600.000	4.500.000	6.500.000	12.111.000
TOTAL		3.021.283	3.650.000	4.600.000	37.000.000	45.000.000	93.271.283

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 berikut ini :

Tabel 12 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bone 2020-2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas	2.860.283	3.000.000	4.000.000	32.500.000	38.500.000
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya	26.864	100.000	125.000	23.000.000	28.500.000
	Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	0	30.000	30.000	3.350.000	3.350.000
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	2.347.146	2.500.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Penindang-Undang yang berlaku					
Penyelenggaraan Operasional; dan Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas	647.273	670.000	645.000	2.650.000	3.160.000
	Meningkatnya kualitas					

	layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor					

Tabel 13 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bone 2020-2024
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	161.000	350.000	350.000	4.500.000	6.500.000
	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal					
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	14.260	0	0	200.000	300.000
Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	0	0	0	450.000	600.000
Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	0	50.000	100.000	1.200.000	1.500.000
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	147.099	300.000	250.000	1.100.000	1.800.000
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas					
	Meningkatnya kualitas					

	layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
6. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Tertaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan	0	0	0	850.000	1.500.000
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, saran dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	0	0	0	700.000	800.000

- b. Menjabarkan SOP yang telah ditetapkan serta pengukuran indikator kinerjanya disetiap sub bagian
 - c. Mengimplementasikan Standar Layanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan atas setiap jenis layanan yang diberikan
 - d. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU Kabupaten Bone
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bone
 - h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
 - i. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Bone
 - j. Melaksanakan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bone secara optimal
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :
- a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan
 - b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPU Kota hingga Badan Penyelenggara Adhock secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
 - d. Melakukan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
 - e. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

3.4. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Bone

Kerangka Regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Bone dalam menyusun regulasi tetap

berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta regulasi lainnya yang terkait. Peraturan yang diperlukan oleh KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non Tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan adalah :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan

A. Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden
2. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
3. Pemutakhiran Data Pemilih
4. Pencalonan
5. Kampanye
6. Sosialisasi
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu
8. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan
2. Pemutakhiran Data Pemilih
3. Pencalonan
4. Kampanye
5. Sosialisasi
6. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan
7. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara
9. Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih

II. Terkait dengan Dukungan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu

1. Peraturan tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

2. Peraturan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
3. Peraturan tentang Kepegawaian
4. Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
5. Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas

3.5. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Bone

Kerangka Kelembagaan merujuk pada Organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum kedepan untuk memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone diantaranya adalah :

1. Penguatan organisasi Internal KPU Kabupaten Bone, berupa penataan tugas, fungsi dan wewenang antar Divisi/Sub Bagian, serta Standar Operasional Prosedur
2. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Bone yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik
5. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.

Adapun lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini bekerjasama dengan KPU Kabupaten Bone adalah :

- 1) Bawaslu Bone;
- 2) Pemerintah Daerah;
- 3) TNI;

- 4) POLRI;
- 5) DPRD Kabupaten Bone;
- 6) Perguruan Tinggi;
- 7) Organisasi Masyarakat, dan
- 8) Pemerhati Pemilu.



Gambar 4 Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan

BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020-2024 merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam menentukan Rencana Kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut. Dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020-2024 dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone serta matriks kerangka regulasi.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, serta Renstra KPU RI Tahun 2020-2024. Dalam hal ini seluruh jajaran KPU tidak terkecuali KPU Kabupaten Bone tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020-2024 ini. Renstra ini menjadi dasar untuk selanjutnya menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja agar implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal : 29 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

IZHARUL HAQ



Lampiran 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N- B-NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE														
Sasaran Strategis 1														
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas														
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	20%	25%	30%	35%	40%									
Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Multiparti dan dipublikasikan pada public														
Sasaran Strategis 2														
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas														
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	74	75	76	77	78									
Indeks Reformasi Birokrasi														
Indikator	B	B	B	B	B									

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N/B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0	0	0	0,17%	0,16%								
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan	0	0	100%	100%	100%								
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							2.860.283	3.300.000	4.000.000	32.500.000	38.500.000			
	Sasaran Program 1 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas Program													
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%								

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	KUL-N-B-NS-BS			
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023			2024		
	Sasaran Program 2 Memipkainya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Program														
	2.1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B									
	Indikator Kinerja Sasaran Program														
	2.2. Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Rekrutasi Berbasis	74	75	76	77	78									
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan														
	Indikator Kinerja Sasaran Program														
	3.1. Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%									
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya														
	Indikator Kinerja														
	1.1. Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan mitra terkait dalam rangka penguatan keramahan Demokrasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	7 Kegiatan	8 Kegiatan	9 Kegiatan									
							26.854	100.000	125.000	23.000.000	28.500.000				
													Subbagian Teknis dan Humas		
													Subbagian Teknis dan Humas		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)				K/L- N-B- NS- ES		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang efektif dan efisien												Subbagian Program Data
	Indikator Kinerja 2.1. Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	5 kali	7 kali	7 kali							Subbagian Program Data
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Sistem administrasi penanggulangan Pemilu yang terbib, efektif dan efisien												Subbagian Program Data
	Indikator Kinerja 3.1. Persentase laporan monitring dan evaluasi yang akurabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Program Data
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Capaian Kinerja yang sesuai dengan Peraturan Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%							Subbagian Program Data
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawain						0	30.000	30.000	3.3350.00	3.350.000		Subbagian KUL
	Sasaran Kegiatan 1 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhuk												Subbagian KUL
	Indikator Kinerja 1.1. Jumlah Badan adhuc yang diciptakan dan dibentuk	-	-	-	27 Kec	27 Kec							Subbagian KUL

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator		Tingkat Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Kategori Pembelangan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021		2022	2023
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara											2.347.146	2.500.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pembinaan/Perencanaan														
	Indikator Kinerja														
	1.1. Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan Anggaran yang adaasi ketertuban	100%	100%	100%	100%										
	Sasaran Kegiatan 2 Terjaksainnya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.														
	Indikator Kinerja														
	2.1. Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap.	3 Lap.	2 Lap.	2 Lap.	2 Lap.									
	Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran														
	Indikator Kinerja														
	3.1. Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMCHERKA yang cepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%									
	Sasaran Kegiatan 4 Terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku														
	Indikator Kinerja														
	4.1. Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMR yang Delatnya sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap									
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prastana Perkantoran											647.273	670.000	845.000	2.650.000	3.150.000
	Sasaran Kegiatan 1														
	Subbagian KUL														
	Subbagian KUL														
	Subbagian KUL														
	Subbagian KUL														
	Subbagian KUL														
	Subbagian KUL														
	Subbagian KUL														
	Subbagian KUL														

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Output) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)				Unit Organisasi / Pelaksanaan	KLN- BNS- BS		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023			2024	
	Indikator Kinerja													
	3.1. Peningkatkan Calon Peserta Pemilu yang dapat dilibatkan	-	-	-	100%	100%								
	Sasaran Kegiatan 4													
	Tersedianya Pedoman Pelaporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota parlemen DPR													Subbagian Teknis dan Humas
	Indikator Kinerja													
	4.1. Peningkatkan Data kopengurusan Partai Politik yang dimutakhirkan	-	40%	60%	40%	50%								
	4. Fasilitas Pemilih Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						147.059	300.000	260.000	1.100.000	1.600.000			
	Sasaran Kegiatan 1													
	Peningkatan Rumah Pintar Pemilu													Subbagian Teknis dan Humas
	Indikator Kinerja													
	1.1. Peningkatan Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilu						100%	100%	100%	100%	100%			
	Indikator Kinerja													
	1.2. Peningkatan Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu						100%	100%	100%	100%	100%			
	Sasaran Kegiatan 2													
	Peningkatan Pemilih kepada Masyarakat Umum													Subbagian Teknis dan Humas
	Indikator Kinerja													
	2.1. Peningkatan Pendidikan Pemilih Kepribadian dan demokratisasi	100%	100%	100%	100%	100%								

	dan Masyarakat Indikator Kinerja 5.1. Persentase penyempurnaan informasi dan publikasi dalam tabuhan Pemilu / Pemilihan yang ditempatkan di media publikasi	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Subbagian Teknis dan Humas
	Sasaran Kegiatan 1 Terdakarnya fasilitas pengelolan data kebutuhan, pengadaan, penyaluran, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu / Pemilihan									Subbagian KUL
	Indikator Kinerja 1.1. Persentase pemertuan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Logistik Pemilu / Pemilihan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Subbagian KUL
	Indikator Kinerja 1.2. Persentase pengadaan Logistik Pemilu / Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Subbagian KUL
	Indikator Kinerja 1.3. Persentase ketepatan logistik yang dibutuhkan baik tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Subbagian KUL
	Indikator Kinerja 1.4. Persentase penguatan/kegiatan dan pemeliharaan logistik Pemilu / Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Subbagian KUL

